

Turbulensi Geopolitik dan *Nexus* Diplomasi Lingkungan Indonesia

Yunita Asmawati^{1*}

¹ Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Palangka Raya, Indonesia

ARTICLE INFO

Date received: 24 June 2025
Revision date: 16 March 2026
Date published: 03 April 2026

Keywords

China;
environmental diplomacy;
constructivism;
Trump;
geopolitical turbulence

Correspondence

Email:
yasmawati80@gmail.com

*Corresponding author

ABSTRACT

This article narrates the condition of global geopolitical turbulence stemming from a foreign policy event between the United States and China following President Donald Trump's tariff policy, which has created a new map in systemic relations. Whether it is in foreign policy interactions or the patterns of state alliances beyond the contestation of global power. This momentum coercively tests the strength of world nations, including Indonesia, in responding to global uncertainty. At the same time, this geopolitical turbulence creates a vacuum in leadership profiles on the global stage that provide solutions to the environmental crisis and also presents an imbalance in the availability of the Supply Chain with the energy transition. Indonesia actually has a structure within domestic entities that should strengthen the nexus of Indonesia's environmental diplomacy in facing that turbulent period. Especially by taking lessons from ancient Chinese history. This article finds that a state's strength amidst geopolitical turbulence to endure and increase its bargaining power does not always stem from material factors, but from perceptions that shape the state's identity. Therefore, this article is conceived using an interpretative qualitative design. Specifically, by using the thoughts of Katzenstein (holistically) and Wendt (systemically) in layers, without mixing the ontology of both within the realm of constructivist international relations thought. The theoretical and practical implication is that when environmental diplomacy and geopolitics are able to mutually reinforce and positively shape each other.

PENDAHULUAN

Peta geopolitik global di awal tahun 2025 dilatarbelakangi oleh dinamisnya interaksi kebijakan luar negeri negara-negara dalam politik internasional. Persaingan kekuatan besar dunia bergerak dalam berbagai lini. Sumber kekuatan besar tidak lagi hanya bersandar pada paksaan hard politics seperti kekuatan pertahanan militer. Sebaliknya, penggunaan soft politics (Nye, 2025; Yaqoub et al., 2026) melalui penguasaan sumber daya strategis dan narasi keberlanjutan lingkungan sangat krusial dalam pergeseran peta kekuatan global. Misalnya Pasca Perang Dingin 1992, di mana kekuasaan dunia masih menyuguhkan bipolarisasi besar antara Rusia dengan Amerika Serikat. Kekuatan Rusia sendiri tidak melemah pasca Perang Dingin, ataupun merubah arah polarisasi secara tunggal. Meskipun klaim kemenangan Amerika menjadikan sentrisme Amerika menguat. Misalnya data SIPRI bahwa estimasi laju peningkatan pengeluaran militer Rusia tahun 1999-2000 yang mencapai 44% (SIPRI, 2001). Secara konsisten hingga 2018 Rusia berada di antara lima aktor negara pembelanja militer terdepan dunia. Bahkan 2019 belanja militer Rusia lebih tinggi keempat dari Tiongkok dan negara-negara Eropa dan sedikit lebih tinggi dari Amerika Serikat (SIPRI, 2025). Bahkan pengeluaran militer Rusia mencapai sekitar \$ 149 miliar pada tahun 2024 (SIPRI, 2025).

Sementara, memasuki abad 21 ada kekuatan Tiongkok mulai hadir dengan pengaruh dunia yang besar (Obaidullah & Hossain, 2025). Namun di antara yang penting dari berbagai aspek adalah strategi, *soft power* hingga membentuk pengaruh global (Obaidullah & Hossain, 2025). Ketiga aspek ini dimanifestasikan pula ke dalam berbagai program-program strategis besar Tiongkok seperti China Belt Road Initiative atau BRI (Joy, Karlekar, & Tripathi, 2025; Obaidullah & Hossain, 2025). Pencapaian strategi besar Tiongkok dalam merekonstruksi persepsi global terhadap eksistensi kekuatan Tiongkok dan menggagas kolaborasi sangat mengedepankan *soft power*. Perlahan kekuatan Tiongkok menjadi ancaman bagi sentrisme Amerika dan memetakan arus baru dalam kekuatan geopolitik. Ambisi besar kepemimpinan Donald Trump periode kedua pada kejayaan Amerika, menegaskan Make America Great Again (Foster, 2025; Coulson, 2022; Hickel, & Murphy, 2021). Ini diejawantahkan dalam banyak kebijakan Trump. Dimulai dengan kebijakan perdagangan luar negeri Trump melalui tarif bagi negara dunia.

Kebijakan ini kemudian menegaskan kontestasi Amerika-Tiongkok sebagai kekuatan besar. Trump, sebagai aktor negara yang dalam pandangan konstruktivis adalah sebagai agen seperti individu, aktor negara, dan aktor non-negara (Wendt, 1992; Checkel, 2008). Bagi konstruktivisme, ada situasi dunia yang ingin dikonstruksikan melalui proses interaksi kebijakan luar negeri yang melibatkan agents dan struktur yang saling mempengaruhi. Selain itu, memperlihatkan bagaimana Trump sebagai state agent mencoba mempengaruhi struktur di luar batas wilayah negaranya. Kemudian, manifestasi konstruksi struktur global (Yaqoub et al., 2026) yang digerakkan Trump pada negara dunia sejatinya sangat mengena. Terutama pada beberapa negara yang dibidik seperti China (Lighthizer, 2023), selain Kanada dan Meksiko. Trump memilih penggunaan koersif *economic stick* (tongkat/paksaan) dibandingkan insentif *carrot* (wortel/bujukan) dalam mengedepankan kebijakan tarif tersebut (Nye, 2025). Negara merespons dengan berbagai kepentingan termasuk Indonesia, demikian juga dengan dampaknya. Oleh karena itu, negara dunia dituntut pada ketepatan pilihan instrumen Kebijakan luar negeri tersebut. Hal ini menjadi binari geopolitik di level sistemik (Wendt, 1992; Finnemore, 1996; Lawler, 2024). Baik bagi Tiongkok hingga bagi Indonesia yaitu, di mana proteksi perdagangan dapat menjadi manfaat konstruktif dari sikap agent yang menguntungkan negara bangsa, selain ancaman negara.

Selain respons, dampak yang muncul beragam bagi banyak struktur dan agen. Hal ini terjadi di tiga tingkatan, yaitu di level sistemik (Wendt, 1992; Finnemore, 1996; Lawler, 2024), level unit (Katzenstein, 1996; Lawler, 2024; Charskykh, 2022) hingga holistik (Katzenstein, 1996; Lawler, 2024; Charskykh, 2022) Johnston, 1995; Legro). Mekanismenya adalah melalui penegakan norma dan nilai dalam sistem internasional, yang membentuk identitas kolektif dan konteks sosial yang mengarahkan perilaku aktor. Sementara implikasinya, geopolitik global mengalami turbulensi dan renarasi yang tidak dapat dihindari.

Berbagai potensi Indonesia diperlukan ketika memutuskan kebijakan yang dinaggap Indonesia sebagai solusi menghadapi dinamika tersebut. Apakah dengan memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi SDA serta memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Maka bagaimana potensi Indonesia ketika kebijakan tersebut diambil untuk menghadapi guncangan pada geopolitik? bagaimanapun dampak bagi kapabilitas sebagai struktur dalam entitas negara secara berkelanjutan tercermin dalam banyak realitas. Situasi ini menguji *state agents* memahami kebutuhan dan kekuatan kapabilitas negaranya dalam sistem internasional yang sistemik dan holistik.

Persaingan senjata dan sanksi ekonomi antar kekuatan besar menciptakan dua masalah utama. Pertama, tidak ada pemimpin global yang menawarkan solusi konkret untuk krisis iklim.

Maka, di sinilah peluang Indonesia. Indonesia bisa menjadi penyeimbang dengan memimpin diplomasi lingkungan. Hal ini menunjukkan posisi tawar Indonesia yang kuat melalui solusi keberlanjutan dan aset hijau. Buktinya Indonesia menerima pendanaan \$21,6 miliar dari koalisi negara maju melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk dekarbonisasi sektor energi. Ini memosisikan Indonesia secara strategis sebagai pemimpin transisi energi (JETP Secretariat Indonesia, 2023).

Kedua, *supply chain* dan ketimpangan transaksi energi. Ambisi *net-zero* bertabrakan dengan keterbatasan sumber daya alam. Invasi antar negara membuktikan ketergantungan pada bahan baku fosil. Ini menjadi kelemahan geopolitik. Sekaligus menjadi pesan kunci terhadap pergeseran peran dari penyedia bahan baku bagi rantai pasok menjadi pemain utama dalam *supply chain* melalui misalnya *green industrialization*. Bukti kekuatan Indonesia misalnya pada penguasaan terhadap salah satu sumber daya alam berupa pasokan nikel global sebesar 42% (USGS, 2024). Bahkan bukti ini tidak menjadi satu-satunya yang dimiliki Indonesia, terutama dengan legitimasi diplomasi lingkungan Indonesia dalam sejarah hilirisasi sumber daya alamnya.

Ini memperlihatkan bagaimana lingkungan berpengaruh pada arena geopolitik. Artikel ini mengemukakan bahwa geografi dan diplomasi lingkungan saling memperkuat dan saling membentuk. Kondisi spasial membentuk praktik diplomatik. Sebaliknya diplomasi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengelola realitas geopolitik. Misalnya pada penelitian terdahulu milik Clark & Jones memperlihatkan bagaimana diplomasi dan kebijakan luar negeri dibentuk oleh keterhubungan geopolitik lintas ruang (*teleconnections*). Peristiwa di satu wilayah dapat memengaruhi dinamika politik di wilayah lain (Clark, & Jones, 2019). Persis sebagaimana yang menjadi persoalan dan eviden di atas. Inilah mengapa penting memberikan ruang pemahaman diplomasi secara spasial. Karena bagaimanapun, sebagaimana McConnell, praktik diplomasi sangat dipengaruhi oleh ruang, tempat, dan konteks geografis (McConnell, 2019).

Kompleksitas geopolitik tersebut, menegaskan pentingnya konstruktivisme Peter Katzenstein dan Alexander Wendt dalam hubungan internasional dalam mengkaji nexus diplomasi lingkungan dalam geopolitik yang mengalami turbulensi secara global. Tepatnya pertama, melalui momentum anarkisnya kebijakan perdagangan luar negeri Trump yang selalu dikaitkan dengan bagaimana retorika *America First* yang proteksionis melalui MAGA sangat dalam diletakkan dalam tindakan Trump. Sehingga manfaat teoretis ditangkap melalui adanya identitas, narasi dan persepsi yang terbentuk dikupas dalam kerangka konstruktivisme. Baik identitas, persepsi, dan narasi yang dilekatkan pada Amerika memiliki peran signifikan dalam membentuk arah hubungan internasional. Sehingga kedua, untuk menemukan bagaimana *state agents* seperti Tiongkok dianggap sebagai ancaman besar Amerika dalam keseimbangan unipolarnya. Secara praktis bermanfaat bagi Indonesia dan negara lain di luar kontestasi US-Tiongkok bukan hanya dalam memahami rivalitasnya. Namun guna memetakan persepsi dan merancang kebijakan luar negeri Indonesia yang tepat dalam memberikan proteksi bagi nilai kedaulatan bangsa. Terpenting ketiga, tentang potensialnya langkah diplomasi lingkungan Indonesia mengelola dampak ini di luar kontestasi dua kekuatan besar tersebut.

METODE PENELITIAN

Terdapat pertimbangan epistemologi dalam hubungan internasional di mana berbagai interaksi menyebabkan turbulensi bagi peta geopolitik global. Maka tulisan ini diangkat tidak lagi berfokus pada ‘mengapa negara terlibat dalam perang dagang’ sebagai bentuk anarkis aktor tunggal Realis yang menekankan kekuasaan tertinggi pada negara. Sebaliknya, tulisan ini menginterpretasikan relevansi di luar negara seperti individu dan aktor non-negara. Lini pergerakan

diplomasi yang meluas memperlihatkan relasi kekuatan yang tidak dapat dinafikan dalam geopolitik hari ini. Sehingga level unit analisis dibutuhkan secara holistik untuk menghadapi dinamika global yang intersubjektif. Tepatnya dengan menjembatani level unit domestik dan level sistemik pada interaksi antar negara.

Sumber data sekunder yang memiliki pengayaan sejarah, nilai dan pernyataan kebijakan digunakan dalam artikel ini. Seperti kebutuhan di lapisan terluar adalah arsip, dokumen hukum internasional, literatur sejarah. Kemudian pada lapisan inti diperlukan misalnya dokumen pidato dan pernyataan resmi terkait misalnya hilirisasi, dokumen kebijakan global seperti JETP. Digunakan pula sumber sekunder dari berbagai media otoritatif. Kesemua data ini yang kemudian menjadi instrumen analitis peneliti dalam meninterpretasikan konstruksi identitas dan persepsi diplomasi lingkungan Indonesia di tengah dinamika turbulensi geopolitik global.

Untuk mencapai tujuan penelitian, tulisan ini didesain secara kualitatif deskriptif-interpretatif dengan membawa konstruktivisme pemikiran Wendt dan Katzenstein (Katzenstein, 1996; Wendt, 1992) dilibatkan dalam analisis secara bertingkat. Penting untuk mengkolaborasikan Wendt dengan Katzenstein dengan tanpa mencampurkan ontologinya. Lapisan terluar adalah mengkaji secara holistik, mencakup elemen domestik dan internasional sekaligus di mana pemikiran Katzenstein ditempatkan (Katzenstein, 1996; Charskykh, 2022). Lapisan ini berisi pemikiran tentang norma, budaya nasional dan identitas negara seperti hilirisasi Indonesia dalam perjalanan sejarahnya sebagai akar identitas Indonesia. Dengan kata lain *domestic driven identity* di mana identitas dibentuk dari domestik ke luar secara holistik (Katzenstein, 1996). Sehingga mencakup pula identitas Indonesia sebagai negara berdaulat dalam sumber daya alamnya di internal Indonesia. Pemikiran Katzenstein ini akan menegaskan ‘siapa Indonesia sebenarnya di antara negara-negara internasional’.

Kemudian, Wendt pada lapisan inti membedah interaksi sistemik kekuatan besar tepatnya state-to-state interaction (Wendt, 1992; Finnemore, 1996; Lawler, 2024). Hasil interaksi ini yang kelak turut pula membentuk identitas negara atau *interaction-driven identity* (Wendt, 1992). Negara akan dianalisis identitasnya dari interaksi sosial di tingkat internasional atau secara sistemik (Wendt, 1992; Finnemore, 1996; Lawler, 2024). Sehingga cakupannya terdapat persepsi yang disesuaikan atas hasil interaksi negara dengan negara lain (aksi-reaksi) yang memberikan input bagi identitas negara. Intinya akan memunculkan jawaban atas ‘bagaimana Indonesia bersikap setelah melihat negara rival atau kawan internasionalnya?’ Bila Katzenstein menganalisis norma domestik yang memengaruhi respon kebijakan ke luar, maka Wendt melihat kebijakan itu lahir dari bagaimana negara mempersepsikan negara-negara lain untuk menentukan sikap dan tindakannya. Pendekatan ini secara kualitatif mengenai bagaimana Indonesia menggunakan identitas. Selain juga mengenai komitmen lingkungan dalam merespons persaingan AS-Tiongkok, sesuai dengan analisis konstruktivis dalam kebijakan luar negeri.

Spektrum dan Konsep Diplomasi Lingkungan melalui Relevansi Konstruktivisme

Kepentingan *state* dan *non-state agents* pada kasus-kasus lingkungan dipicu dari banyak peristiwa. Bahkan beberapa di antaranya menjadi spektrum dalam diplomasi lingkungan sebelum Stockholm Conference tahun 1972. Misalnya Ramsar Convention tahun 1971 sebagai upaya perlindungan lahan basah yang dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap bermigrasinya unggas. Kemudian metafora Garrett Hardin tentang “*Tragedy of the Common*” atas kekhawatiran penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang memicu kerugian bagi banyak pihak sebagai tragedi bagi masyarakat. Referensi lain misalnya kekhawatiran dampak pestisida terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dalam tulisan Rachel Carlson “*Silent Spring*” tahun 1950-an.

Pasca beberapa referensi tersebut, perhatian dunia terkonstruksi pada kesadaran ekologis yang menggiring agen pada wilayah pertukaran ide, nilai dan norma tentang penanggulangan krisis lingkungan. Terutama ketika aktifitas ini terbentuk dalam sarana yang formal untuk mengikat komitmen negara seperti diplomasi antar pemerintah. Tepatnya pada saluran *Government to Government relationships*. Aktivitas diplomasi ini terkonstruksi dari level unit dalam suatu negara yang kemudian dibawa sebagai sebuah ide bersama dalam level sistemik. Level sistemik dipandang Wendt sebagai tingkat analisis yang menekankan struktur sistem internasional yang tidak bersifat material dan tetap. Melainkan sebuah kondisi yang terkonstruksi secara sosial dari sebuah gagasan, norma, identitas, dan interaksi sosial antar aktor negara dan non-negara (Wendt, 1992).

Karenanya Susskind memanasifestasikan upaya negara-negara ini ke dalam aktivitas diplomasi lingkungan atau *environmental diplomacy*. Susskind (Susskind., Ali & Hamid, 2015) menggarisbawahi kegiatan multilateral yang melibatkan tidak hanya aktor negara. Akan tetapi juga melibatkan aktor seperti organisasi pemerintahan *intergovernmental organizations* atau IGOs, *Non-Governmental Organizations* atau NGOs, dan individu. Kolaborasi antar aktor ini mampu mengkonstruksikan kepentingan nasional negara dalam perubahan kondisi lingkungan global. Utamanya dalam menemukan respons terkoordinasi terhadap masalah lingkungan hidup sebagai aktivitas dalam diplomasi lingkungan. Termasuk pula kerjasama negara dalam konteks perjanjian multilateral sebagai cara terbaik dalam menegosiasikan isu lingkungan dalam konteks keamanan internasional yang lebih luas.

Saluran diplomasi tersebut meluas tidak saja pada level sistemik yang menyuguhkan upaya antar bangsa di ruang eksternal (Wendt, 1992). Namun perluasan ruang untuk saling memberi pengaruh pada ide, nilai dan norma dan mengedepankan identitas masing-masing agen dalam persoalan lingkungan melalui diplomasi meluas. Tepatnya di mana masyarakat dan atau civil society dalam kerangka *non-state actor* sebagai entitas negara hadir menguatkan kepentingan keberlanjutan lingkungan bagi negara di level holistik. Diplomasi lingkungan kemudian menemukan kerangka yang inklusif melalui keluasan saluran relasi ini. Inklusifitas ini juga mendasari pemikiran Susskind tentang bagaimana aktivitas diplomasi lingkungan dilakukan tidak semata inovatif. Penekanannya bahwa perbedaan kedua aspek unit (di level domestik) dengan aspek sistemik (di level internasional) memiliki tatanan sosial dan politik yang sama secara holistik. Tepatnya ketika inter-relasi antar negara dalam tatanan global saling menguntungkan.

Artinya tidak cukup kepentingan keberlanjutan lingkungan diletakkan hanya sebagai bagian domestik tanpa melihat kebutuhan masyarakat secara global. Karena dominasi masing-masing domestik berpotensi menajamkan konvergensi kepentingan dan identitas satu negara secara terus-menerus terhadap negara lain tanpa melihat kepentingan bersama secara global (Katzenstein, 1989). Sehingga kebutuhan negara-negara ini sejatinya dapat dikonstruksikan dalam penyesuaian untuk menghasilkan solusi bersama meskipun dengan tanggungjawab yang beragam.

Fondasi Konseptual: Memahami Geopolitik dan Volatilitasnya

Geopolitik sendiri merupakan studi di mana geografi mempengaruhi politik dan hubungan internasional. Fokus awal pada geopolitik adalah tentang interaksi antara kekuatan, wilayah geografi, dan kepentingan negara (Dodds, 2007; Ignatyeva & Исаев, 2019). Atau “ilmu bumi politik” (political geography) dengan memandang negara terkait dengan ruang geografi di mana negara tersebut berada. Menyitir sejarah klasik di mana Heartland (pentingnya penguasaan wilayah Eurasia) dan Rimland (pentingnya penguasaan wilayah pesisir) dikembangkan melalui pemahaman geopolitik (Kolossov & Vendina, 2016; Snyder, 2004). Hingga pada perkembangannya mencakup berbagai aspek yang lebih

luas yang membentuk interaksi global (Dodds, 2007). Karena sejatinya geopolitik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek yang mempengaruhi hubungan internasional negara-negara dan dinamika globalnya. Terutama dalam merespons perubahan global yang akan memberi dampak pada kondisi geopolitik pada volatilitasnya.

Konsep Turbulensi Geopolitik; dari "*Turbulent Peace*" ke "*Protean Power*"

Crocker, Hampson, dan Aall menganalisis volatilitas geopolitik global dalam karya seminalnya tentang '*Turbulent Peace*'. Menurut Crocker dkk bahwa geopolitik global sebagai fenomena yang menggabungkan kerentanan negara-negara dan masyarakat dalam dunia yang semakin saling terhubung namun terdesentralisasi secara politis dan sosial (Bilder et al., 1997). Crocker dkk menekankan bahwa diversifikasi kebutuhan masyarakat global terhadap perdamaian memerlukan strategi perdamaian yang beragam dan terdifferensiasi.

Meskipun tidak menggunakan istilah '*geopolitical turbulence*' secara eksplisit, Crocker dkk melihat konsep '*Turbulent Peace*' ini memiliki esensi ketidakstabilan hubungan internasional pasca-Perang Dingin. Ini menjadi suatu paradoks di mana, terlepas dari absennya perang besar antar kekuatan utama, dunia mengalami berbagai ancaman baru yang tidak terduga dan kompleks (Bilder et al., 1997). Ancaman-ancaman tersebut mencakup perubahan signifikan dalam aliansi politik, rekalkulasi dinamika kekuasaan global, serta dimensi-dimensi kapabilitas strategis dan perhitungan rasionalitas aktor internasional yang terus bergeser (Katzenstein & Seybert, 2021). Kapabilitas strategis ini seperti ekonomi dan lingkungan yang selalu bergerak masive dengan transformasi yang tinggi. Bahkan dalam pergerakan interaksi aktor dalam sistem internasional bersifat fluktuatif dan dalam beberapa kondisi tidak dapat diprediksi (Brzezinski, 2017; Crocker, Hampson and Aall, 2001). Misalnya pada aktor *state agent* atau *non-state agent*. Inilah yang menurut Crocker dkk, bahwa perbedaan kebutuhan aktor, akan menghadirkan perbedaan strategi dalam mencapai perdamaian.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang terus dikejar oleh *state agent* dalam politik global yaitu kepentingan nasional. Refleksi dari sikap dan tindakan negara terhadap negara lain menjadi refleksi atas kepentingan nasional negaranya (Rosenau, 1969) dalam kebijakan luar negerinya. Bahkan Rosenau menekankan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh negara karena melalui hal ini akan mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki negara tersebut (Rosenau, 1969). Rosenau membuat penekanan bahwa orientasi, identitas dan kepentingan nasional dibentuk dalam dunia sosial dan politik internasional yang terkonstruksi. Sehingga kepentingan nasional dan identitas menjadi hal subjektif dan tidak tetap sesuai dengan dinamika perubahan sosial dan politik internasional, wadah kebijakan negara berinteraksi. Konstruksi kepentingan nasional yang dibentuk sebuah negara ini akan menjadikan ekspresi yang keluar dari batas wilayahnya. Hematnya, menjadi ruang bagi negara global dalam memberi nilai pada suatu negara dalam kapabilitas tertentu. Apakah itu dalam kapabilitas lingkungan, sosial budaya, pertahanan dan lainnya. Negara lain akan mengidentifikasi dan melekatkan norma, nilai dan interaksi sosial tersebut pada negara seiring dengan perubahan dalam sistem sosial dan politik internasional.

Selain itu, pola ketidakpastian dan ketidakterdugaan yang inheren dalam dinamika politik internasional menurut Katzenstein dan Seybert dirujuk sebagai turbulensi geopolitik. Ini menunjukkan bahwa geopolitik tidak bersifat statis dan kaku, melainkan bersifat protean power (Katzenstein & Seybert, 2021; Tung et al., 2023). Karakteristik ini mengharuskan aktor-aktor internasional untuk terus mengembangkan kemampuan adaptasi dan inovasi dalam merespons kondisi geopolitik yang tidak dapat diprediksi dan terus berubah. Dengan demikian, kapabilitas untuk beradaptasi dan berinovasi menjadi elemen esensial dalam manajemen lingkungan geopolitik yang

bergejolak. Karena menurut pemikiran menurut Katzenstein dan Seybert, kekuasaan bukan menjadi satu-satunya kemampuan aktor untuk mengontrol dunia (seperti mengontrol peristiwa atau mengontrol aktor lain). Meskipun ketika aktor tersebut mengandalkan *power control* yang berisi kapabilitas dan kalkulasi resiko. Katzenstein & Seybert cenderung tidak menjadikan *power control* yang berisi kapabilitas dan kalkulasi rasio sebagai satu-satunya alat dalam menghadapi situasi turbulensi. Karenanya, *protean power* dengan kemampuan adaptasi dan inovatif melihat kondisi perubahan dunia sangat diperlukan (Katzenstein & Seybert, 2021).

Memahami Diplomasi Lingkungan dalam Geopolitik

Nexus geopolitik dan lingkungan sejatinya telah terbangun lama, misalnya pada ilustrasi Jules Cambon, diplomat perancis di abad 20-an, yang dikutip oleh The Sprout (Rosenau, 1969). "*The geographical position of nation ... is the principal factor conditioning its foreign policy – the principal reason why it must have a foreign policy at all*". The Sprout melihat adanya hubungan kausal antara faktor lingkungan dengan sikap, tindakan atau urusan negara dengan negara lain (Rosenau, 1969; Asmawati, 2017). Besarnya daya tawar lingkungan dalam pertimbangan kebijakan luar negeri dalam pemikiran Cambon juga selaras dengan pendapat Richard von Kühlmann, seorang diplomat Jerman pada abad yang sama. Menurut Kühlmann baik sejarah maupun posisi geografis suatu negara sangat menentukan kebijakan luar negeri yang diambil negara (Rosenau, 1969; Asmawati, 2017). Bahkan menurut Kühlmann terlepas dari berbagai perubahan kontemporer yang sangat cepat (Rosenau, 1969; Asmawati, 2017).

Artinya ada urgensi yang tidak dapat ditinggalkan dari aspek lingkungan dalam kebijakan luar negeri suatu negara yang terstruktur dalam bagian identitas suatu negara. Sehingga identitas ini yang kemudian terstruktur dalam entitas negara dan diperjuangkan. Misalnya dengan level sistemik konstruktivisme yang mengkonstruksikan aspek lain secara sosial internasional untuk keberlanjutan aspek lingkungan. Bahkan terlepas dari perubahan ruang dan waktu sebagaimana pandangan Kühlmann (Rosenau, 1969; Asmawati, 2017). Karena hal ini sangat relevan bahwa kini berbagai perubahan tidak semata menyuguhkan satu ruang fisik namun juga meta fisik. Bahkan dengan pergerakan waktu yang mentransformasikan berbagai kebaruan dunia.

Terlebih ketika berbicara soal degradasi lingkungan dan kelangkaannya dalam sebuah negara. Maka interaksi global menjembatani kebutuhan domestik di mana sumber dayanya diupayakan dengan aktifitas yang melampaui batas negara. Upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat global dari berbagai negara ini yang kemudian memerlukan tindakan kolektif (Pereira, 2015). Karenanya, kompleksitas geopolitik dan diplomasi lingkungan telah menjadi semakin krusial dalam mengatasi tantangan lingkungan global. Terutama persoalan kepentingan nasional yang menjadi struktur yang dapat dikonstruksikan. Bagaimanapun pengejaran kepentingan nasional sering kali bersinggungan dengan keharusan kerja sama internasional untuk perlindungan lingkungan.

Oleh karena itu, diplomasi lingkungan sebagai instrumen kebijakan luar negeri dapat dipergunakan dalam menavigasi hubungan geopolitik yang kompleks tersebut. Terutama dengan mengangkat poin kunci pada diplomasi sebagai sebuah seni dalam berkomunikasi atau dengan berusaha untuk mendamaikan kepentingan nasional yang saling bersinggungan dengan tujuan keberlanjutan lingkungan bersama (Asadov & Asadov, 2020).

HASIL DAN DISKUSI

Berangkat dari persoalan dan tujuan penelitian di atas terdapat lima temuan dalam penelitian ini. Pertama, kebijakan tarif Trump dan narasi MAGA bukan sekadar instrumen ekonomi atau manifestasi kepentingan material Amerika Serikat, melainkan upaya rekonstruksi identitas nasional Amerika yang mencerminkan ketakutan terhadap hilangnya posisi unipolar di tengah munculnya kekuatan besar baru seperti Tiongkok. Narasi ‘America First’ secara konsisten disosialisasikan melalui simbol, retorika, dan kebijakan konkret untuk mengkomunikasikan persepsi bahwa Amerika sedang dalam krisis kepemimpinan global.

Kedua, persepsi Tiongkok sebagai ancaman besar bagi Amerika bukan derivasi langsung dari kapabilitas militer atau ekonomi Tiongkok. Melainkan hasil dari mekanisme interaksi sosial yang self-reinforcing antara kedua negara. Kebijakan proteksionis Amerika (tarif) dipersepsikan China sebagai agresi ekonomi, yang kemudian memicu respons Tiongkok (tarif balasan lebih rendah). Maka ketika diinterpretasikan ulang oleh Amerika, mewujudkan sebagai *defiance* atau *unfair competition*, yang memperkuat konstruksi identitas Tiongkok sebagai adversary yang tidak dapat diandalkan. Ketiga, kebijakan yang tidak konsisten dari Amerika terhadap aliansi-nya (mendukung AUKUS di era Biden, tetapi proteksionis di era Trump) menciptakan persepsi ketidakpastian di kalangan negara-negara aliansi (Australia, UK, Eropa), yang kemudian menghasilkan insentif bagi negara-negara tersebut untuk melakukan diversifikasi dan mencari kemandirian, baik dalam hal supply chain pertahanan maupun diplomasi. Fragmentasi ini menunjukkan bahwa aliansi tradisional unipolar tidak lagi dapat diandalkan sebagai mekanisme keamanan utama.

Keempat, dalam turbulensi geopolitik global, kompetisi untuk membangun persepsi positif dan identitas menarik melalui narasi dan soft power (seperti Belt Road Initiative China, Global Britain UK, dan MAGA America) terbukti sama pentingnya dengan kompetisi material/hard power dalam menentukan arah hubungan internasional dan pengaruh geopolitik. Belt Road Initiative China, misalnya, bukan hanya tentang profit ekonomi, tetapi mekanisme konstruksi identitas Tiongkok yang positif di mata komunitas global untuk memfasilitasi perselarasan kebijakan yang damai tanpa *coercive persuasion*. Soft power ini menjadi instrumen untuk mengubah preferensi negara lain tanpa menggunakan paksaan.

Kelima, dalam turbulensi geopolitik global, keberlanjutan energi dan lingkungan bukan lagi secondary issue atau humanitarian, tetapi faktor strategis yang integral dalam kepentingan keamanan nasional dan perhitungan power setiap negara. Dependensi pada mineral kritis tertentu (*rare earth elements* Tiongkok), energi fosil (minyak untuk operasi militer), dan teknologi hijau menciptakan kerentanan strategis yang dimanfaatkan aktor-aktor untuk mendapatkan leverage geopolitik. Ketidakpastian geopolitik (turbulensi) mendorong aktor-aktor untuk menggunakan standar ganda dalam kebijakan lingkungan. Tepatnya memprioritaskan kepentingan keamanan atas komitmen lingkungan ketika ada konflik antara keduanya. Keenam, strategi hilirisasi Indonesia (pengolahan dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam domestik) merepresentasikan kapasitas adaptasi dan kekuatan inovasi (*protean power*) dari Indonesia sebagai respons terhadap turbulensi geopolitik global. Melalui hilirisasi, Indonesia dapat mengkonstruksi *domestic-driven identity* sebagai negara yang berdaulat atas sumber daya alamnya (sebagaimana Katzenstein). Kemudian, memperkuat posisi negosiasi dalam interaksi sistemik dengan aktor-aktor global yaitu AS, China, dan mitra lainnya (sebagaimana dijelaskan Wendt). Selain itu, Indonesia dapat menggunakan diplomasi lingkungan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kedaulatan dan mengurangi kerentanan terhadap tekanan geopolitik. Terpenting, bahwa hilirisasi ini bukan semata strategi ekonomi, tetapi kebijakan strategis dalam turbulensi geopolitik yang mengintegrasikan tata kelola lingkungan dengan posisi geopolitik.

Turbulensi Geopolitik Global

Kekuasaan menjadi kunci dalam dalam relasi aktivitas hubungan internasional sebagaimana pandangan Realis. Namun bagi konstruktivis akan berbeda pandangan. Tiongkok tidak membicarakan tentang bagaimana kembali berjaya. Meskipun begitu, Tiongkok melalui *Belt Road Initiative* menjadi salah satu yang menjadi gambaran ambisi kejayaan di global. Sementara Amerika Serikat secara jelas menggaungkan untuk berjaya kembali sebagaimana slogan The MAGA atau Make America Great Again. Namun ada beberapa respons bilateral yang dilakukan *state agent* melampaui prinsip-prinsip dasar koersif-impulsif yang lebih luas (Checkel, 2008). Artinya penggunaan entitas stabilitas domestik dipergunakan dalam merespons secara tegas bahwa A akan membuat B melakukan apa yang tidak akan dilakukan B jika tidak demikian (Checkel, 2008). Misalnya pada situasi tegas Tiongkok yang menaikkan tarif balasan dengan angka yang tidak setara dengan AS (Lebih rendah dari AS).

Kemudian diiringi dengan tidak adanya upaya segera Tiongkok bernegosiasi kepada Amerika yang diharapkan Amerika sebagai bentuk *power control* Amerika kepada Tiongkok. Kondisi perubahan lingkungan internasional ini yang kemudian mampu secara koersif menjadikan Amerika sebagai *state agent* melakukan apa yang tidak akan dilakukan oleh Amerika. Yaitu memaksa negara lain untuk segera bernegosiasi kepada Amerika atau mengharapkan upaya negosiasi dilakukan Tiongkok kepada Amerika. Sebaliknya entitas domestik Tiongkok dikonstruksikan dengan kondisi sosial politik yang dihadirkan Amerika. Misalnya, dengan adanya ketidakkonsistenan sikap Amerika dalam menghadapi perubahan respons Tiongkok sebagai *agent*. Maka aktor B akan kembali bernegosiasi setelah respons yang diterima lebih besar dari ancaman yang dibuat di awal.

Hal ini menggambarkan bagaimana *power* dalam struktur mengkonstruksikan kekuatan Tiongkok pasca keterbukaannya dengan tajam dan multifaset (*hard edge and multifaceted*). Pemahaman ini menunjukkan pemahaman kebijakan luar negeri sebagaimana pemikiran Checkel tentang *power*. Bahwa kebijakan luar negeri dapat dan harus mampu dikonstruksikan dengan keadaan dalam relasi hubungan antar negara (Checkel, 2008). Sementara diplomasi menjadi instrumen bagi kebijakan luar negeri melalui penggunaan *power*. Turbulensi geopolitik saat ini merupakan bagian dari transformasi yang lebih luas dalam politik global. Hal ini ditandai dengan munculnya tatanan dunia yang tidak lagi mono-sentris, akan tetapi lebih bersifat multi-sentris yang menghadirkan kontestasi besar dengan sistem yang berpusat pada negara tradisional (Rosenau, 1990). Karena bagaimanapun selain kemajuan teknologi, pergeseran ini didorong oleh perubahan struktur otoritas. Bahkan meningkatnya kemampuan analisis individu juga menjadi pemicu di seluruh dunia yang mengarah pada percabangan struktur global dan tantangan baru dalam konstelasi hubungan internasional.

Kondisi perang tarif Trump menunjukkan bagaimana anarkisnya *agent* dalam memaknai struktur domestik dan sistem politik internasional. Selaras dengan pemikiran Wendt tentang anarkisnya pilihan kebijakan yang diambil negara (Wendt, 1992). Sehingga pergeseran tindakan dan sikap politis yang secara sosial terkonstruksi (*socially constructed*) diambil oleh agen lain berbeda dengan kondisi hubungan sebelum kebijakan tarif diputuskan. Utamanya agen negara--selain agen lain seperti individu dan atau aktor non-negara dalam mengedepankan ragam respons kebijakan luar negeri atas kebijakan tarif tersebut.

Sehingga, perkara geopolitik tidak selalu berada dalam zona yang stabil dalam perdamaianya yang dapat merubah konstruksi stabilitas perdamaian yang telah dinormalisasi sebelumnya. Terjadinya turbulensi geopolitik dapat mengakibatkan perubahan pada banyak dimensi,

di antaranya: Pertama, terkait aktivitas ekologi dan tekanan kebutuhan sumber daya domestik masyarakat global termasuk Amerika sendiri. Kondisi ini dipahami sebagai hasil dinamis dari klaim identitas Amerika Serikat di mata global sebagai pemegang kuasa terbesar dalam banyak aspek seperti hankam, ekonomi dan teknologi. Maka kemunculan kekuatan baru seperti Tiongkok mengancam kepentingan unipolar dan identitas superpower Amerika yang perlu rekonstruksi melalui *The MAGA slogan*. Pengejawantahan dari *The MAGA slogan* ini adalah salah satunya diklaim Trump melalui kebijakan tarif dalam 100 hari kepemimpinan Trump. Ada norma baru yang ingin ditanamkan Trump melalui perannya sebagai *state agent* Amerika dalam mengkonstruksikan dunia lebih selaras dengan struktur domestiknya. Namun kebijakan tarif ini juga mengubah norma dan praktik global yang dipicu dari perdagangan internasional.

Dampak bagi ekologi adalah perubahan norma dan praktik global terkait dengan perdagangan sumber daya alam dan teknologi hijau dapat memperlambat kerjasama internasional dalam isu ekologi dan transisi energi terbarukan yang menganut pemahaman energi bersih. Menjadi besarnya biaya produksi akan menyebabkan perubahan rencana investasi. Misalnya dalam pengembangan investasi dan pengembangan energi terbarukan yang berkontribusi pada rencah karbon. Dampak ini menjadi gambaran ketidakpastian bagi reduksi emisi dan mengembalikan kestabilan iklim global. atau dalam persoalan rantai pasok global dapat memperburuk kondisi kelangkaan tersebut (Kravchuk & Horochovsky, 2024).

Kedua, adalah sudut pandang aliansi dan persahabatan dan kerjasama multilateral. Resonansi kebijakan Trump pada dunia internasional berpotensi pada ketegangan diplomatik dan politik dalam aliansi yang telah digagas Amerika untuk menghadapi pengaruh Tiongkok. Baik itu berupa hubungan diplomatik Quadrilateral maupun Trilateral. Seperti Quadrilateral Security Dialogue bersama Jepang, India dan Australia (QUAD) yang digagas AS sejak 2004-2007. Meskipun mengalami vakum sementara yang dihidupkan kembali pada 2017 hingga kini. Meskipun QUAD menggabungkan persoalan multifungsi strategis dan bukan aliansi militer formal namun pertemuan di antara negara QUAD berhasil melakukan aksi latihan militer bersama (IP Defense Forum, 2024). Sementara Trilateral AUKUS yang baru dibentuk tahun 2021 antara Amerika Serikat, United Kingdom dan Australia (SIPRI, 2023) menjadi penguat bagi QUAD dengan memfokuskan pada militer.

Ada dampak ini bagai *binary* pada keputusan AS dalam menghadapi keamanan di kawasan Indo-Pasifik pasca kebijakan Trump Pada satu sisi kepemimpinan Joe Biden, upaya Amerika menghadapi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik digagas melalui trilateral AUKUS. Sementara Trump di periode kedua menggunakan kebijakan perdagangan yang justru mereduksi kepercayaan di internal aliansi. Potensi ini justru akan memberikan ketidakpastian yang dapat mengurangi ketergantungan di masa mendatang dan kepercayaan dalam aliansi. Terutama dari sisi rantai pasok militer dan industri pertahanan yang akan mendorong negara aliansi melakukan diversifikasi dan kemandirian. Selain itu kemungkinan kondisi *discord* yang akan hadir di dalam tilateral tersebut karena ketegangan di dalam AUKUS. Terburuk justru secara perlahan beralihnya dukungan anggota pada sumber kekuatan lain. Berpotensi pula pada perubahan dukungan Australia dan *United Kingdom* kepada Amerika dalam kepemimpinan Trump.

Hal ini menjadi sebuah *deterrence strategy* terhadap kebijakan proteksionis Amerika dalam perdagangan. Terutama ketika dikaitkan dengan persoalan kepentingan struktur masing-masing domestik negara AUKUS. Artinya ketika AUKUS tidak memberikan kepastian dalam relasi diplomatik yang saling menguntungkan, Australia dan Inggris berpeluang besar melakukan kemandirian. Terlebih ketika Brexit pada 2016 (SIPRI, 2023) telah dilakukan.

Selain negara-negara AUKUS, Eropa telah terinisiasi untuk melakukan kemandirian di domestik negara-negara Eropa. Meskipun data SIPRI menunjukkan bahwa dukungan Amerika dalam persoalan militer dan keamanan di Eropa tahun 2020-2024 mengalami eskalasi 233% (SIPRI, 2025). Tepatnya dengan 64% impor senjata dalam NATO berasal dari Amerika. Bahkan 45% impor persenjataan di Ukraina tahun 2020-2024 didukung oleh Amerika (SIPRI, 2025). Data ini memperlihatkan signifikansi yang sangat tinggi ketika kebijakan baru Amerika akan memberikan perubahan bagi dukungan militer Eropa dari Amerika.

Ketiga, hadirnya kekuatan baru pada kekosongan ruang dalam fragmentasi aliansi global. Bagian ketiga ini sangat urgen dalam stabilitas geopolitik global. Sejatinya terdapat banyak potensi negara yang dalam perspektif Realis sebagai *struggle for power*, di mana konstruktivis menganggapnya sebagai proses sosial internasional yang berkelanjutan. Karenanya, Katzenstein melihat bahwa turbulensi geopolitik ini tidak semata difusi kekuasaan yang dapat dikendalikan namun juga tentang bagaimana *state agent* beradaptasi dan mengeluarkan solusi yang inovatif. Terkait dengan AUKUS, kesepakatan krusial antara Selandia Baru dan negara-negara anggota Kepulauan Pasifik yang disebut McDougall sebagai negara “Persemakmuran Pasifik” dan “Persemakmuran Asia” Asia Selatan, Malaysia, dan Singapura di Asia Tenggara (Joy, Karlekar, & Tripathi, 2025; McDougall 2023). Bahkan AUKUS dipandang sebagai media Inggris pasca BREXIT dalam menciptakan “*global Britain*” atau Inggris Global, sehingga menggambarkan relevansi strategis AUKUS di abad ke-21 (Joy, Karlekar, & Tripathi; McDougall 2023). Sementara Brexit bagi Uni Eropa dapat menjadi sebuah reduksi bagi kekuatan Uni Eropa.

Sementara diaspora *Belt Road Initiative*. Tiongkok (Joy, Karlekar, & Tripathi, 2025; Obaidullah & Hossain, 2025), sangat masiv. Melalui peta geografisnya *Belt Road Initiative*. Secara perlahan merambah banyak negara dan kawasan sejak dibentuknya pada 2013. Sejak Tahun 2013 negara yang berhasil dicapai melalui investasi *Belt Road Initiative*. Tiongkok seperti Mongolia, Kirgistan, Pakistan Afghanistan serta beberapa negara Eropa yaitu Belarusia, Moldova dan Makedonia (McBride., dkk, 2023). Sementara ke Selatan seperti Macau dan Hongkong yang masih dianggap China sebagai wilayah administratifnya. Kemudian dua negara Asia Tenggara yaitu Thailand dan Kamboja (McBride., dkk, 2023). Sementara itu sejak 2014-2019 tercatat 147 negara atau 2/3 populasi negara dunia dan 40% PDB global telah melakukan penandatanganan pada proyek investasi infrastruktur Tiongkok yang beragam dalam *Belt Road Initiative*. termasuk seluruh kawasan Asia Tenggara (McBride., dkk, 2023). Tiongkok juga menciptakan pengaruh geopolitik yang semakin dalam melalui politik dan ketergantungan ekonomi. *Belt Road Initiative*. Tiongkok dianggap sebagai instrumen Tiongkok dalam merekonstruksikan persepsi global terhadap Tiongkok secara positif dan memperluas pengaruh politiknya.

Karenanya bagi konstruktivisme, proyek investasi infrastruktur Tiongkok bukan satu-satunya tujuan Tiongkok dalam membangun koneksi melalui *Belt Road Initiative*. Namun lebih dalam sebagai sebuah cara yang dinarasikan Tiongkok dalam mengatur dinamika politik global melalui *soft power* diplomacy-nya. Pandangan konstruktivisme, Tiongkok memposisikan Negara global perlu terlebih dahulu untuk memiliki persepsi positif terhadap Tiongkok melalui proyek investasi infrastruktur. Ini menjadi bagian penting dalam lekatnya identitas Tiongkok di mata global yang tidak semata tentang kekuatan militer dan material seperti infrastruktur besarnya.

Maka citra positif ini menjadi fondasi awal terbangunnya kepercayaan global yang memudahkan penyelarasan kebijakan antara kepentingan Tiongkok dengan negara lain secara damai dan tidak dengan *coercive persuasion*. Namun lebih kepada nilai yang menjadi daya tarik Tiongkok bagi negara lain. Interaksi sosial dan komunikasi antar negara ini yang dipelihara Tiongkok dalam

mengkonstruksikan norma baru di konstelasi internasional melalui *Belt Road Initiative*. Obaidullah & Hossain melihatnya sebagai cara yang serta dengan pendekatan yang sangat halus dan terintegrasi baik itu di level regional maupun global (Obaidullah & Hossain, 2025). Bahkan *Belt Road Initiative* menjadi rencana jalur sutra baru bagi Tiongkok. tepatnya sabuk ekonomi jalur sutra darat dan jalur sutra maritim Tiongkok ke negara-negara lain dengan kebaruannya (McBride., dkk, 2023).

Perubahan kebijakan luar negeri AS dalam politik internasional sejatinya sebagai instrumen dalam meraih kejayaan AS dalam masa kejayaan globalisasi. Namun perubahan ini menyisakan turbulensi bagi perdamaian geopolitik, tereduksinya kepercayaan global hingga tercipta ruang kosong dalam fragmentasi unipolar yang diklaim Amerika. Sehingga memunculkan potensi kekuatan baru. Negara dunia menggunakan simbol, slogan, dan kebijakan besar sebagai alat untuk membangun persepsi, membentuk identitas nasional, dan mempengaruhi opini internasional. Hadirnya Tiongkok dengan menghidupkan kembali Jalur Sutra melalui *Belt Road Initiative* dengan mencakup Jalur Sutra darat dan maritim. Sementara AS ingin kembali meraih kejayaan melalui The MAGA Slogan atau *Make America Great Again*. Sementara Inggris ingin menghidupkan kembali Great Britain dalam Global Britain. Kontestasi ini bukan sekadar persaingan kekuatan material, tetapi pertarungan narasi, identitas, dan konstruksi sosial atas makna kejayaan, kepemimpinan, dan masa depan dunia. Bagi konstruktivisme, kekuatan global tidak ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau militer semata. Namun juga dari keberhasilan aktor membangun narasi dan identitas yang diakui dan diikuti oleh aktor internasional.

***Nexus* Diplomasi Lingkungan dalam Turbulensi Geopolitik**

Nexus diplomasi lingkungan dan geopolitik global adalah terletak pada kekuatan energi dan lingkungan. Tidak ada keberlanjutan dari teknologi dalam bidang apapun ataupun ekonomi ketika kekuatan energi dan lingkungan tidak mendukung. Artinya temali antara persoalan energi dan lingkungan berkelanjutan dengan turbulensi geopolitik sangat erat. Terutama misalnya pada bidang Militer dan pertahanan. Energi fosil seperti minyak bumi khususnya Avtur (*Aviation Turbine Fuel*) sangat dibutuhkan pada produksi dan operasional pesawat tempur. Negara dengan konsumsi peralatan militer yang tinggi seperti Kompleks Industri Militer Amerika (MIC atau *Military Industrial Complex*) akan terus menjaga kestabilan pasokan dan ketersediaan minyak bumi (Asmawati, 2006). Meskipun, 70-80% kebutuhan energi bagi produksi pesawat tempur Amerika dipenuhi secara mandiri (SIPRI, 2025), namun secara strategis, terkait dengan kebijakan Amerika yang banyak melakukan aktivitas perang dan latihan perang. Maka operasional pada pesawat tempur akan meningkatkan kebutuhan minyak bumi.

Selain itu adalah kebutuhan penopang teknologi yang didesain pada pesawat tempur dan kapal-kapal induk membutuhkan stabilitas kelistrikan yang tinggi dalam operasionalnya, terutama pada penggunaan radar dan alat pencarian dan pelacak. Tiongkok misalnya, menguasai 70-80% produksi global pada mineral kritis dan logam tanah jarang yang dipergunakan bagi pembuatan komponen elektronik, radar, sistem persenjataan dan berbagai kebaruan teknologi militer (SIPRI, 2024). Bahkan ketergantungan global ini termasuk di dalamnya adalah Amerika dengan kepemilikan MIC di domestiknya.

Bahkan selain Amerika negara-negara seperti Rusia, Iran, Tiongkok, India dan Pakistan mengembangkan inovasi kombinasi radar dan sensor canggih bagi pesawat tempurnya yang sangat bergantung pada besarnya energi bumi (SIPRI, 2024). Misalnya listrik yang stabil, mineral dan logam hingga tentunya minyak bumi sebagai dukungan operasional. Beberapa hal ini hanya sebagian kecil dari kebutuhan energi pada perlengkapan militer. Sehingga menjaga cadangan strategis ini juga

membutuhkan negara lain sebagai pemasok sumber energi tersebut. Terutama ketika eksistensi MIC melibatkan banyak unsur kepentingan dalam domestik AS (Asmawati, 2006).

Melihat fakta di atas, dapat dikatakan bahwa peristiwa dalam interaksi kebijakan luar negeri-masing-masing negara pada level sistemik memiliki nexus yang kuat pada keberlanjutan energi dan lingkungan. Terlebih ketika terjadinya guncangan ketidakpastian geopolitik, menjadi preferensi aktor dalam menggunakan standar ganda kebijakan luar negerinya. Tuntutan pemahaman yang kuat pada kendali ekologi sangat krusial. Maka diperlukan hadirnya nilai dan norma yang dibangun secara aktif melalui berbagai interaksi kebijakan luar negeri. Hal ini mampu secara kolaboratif membangun kesepahaman pada nexus ini. Karena bagaimanapun kendala yang tidak berimbang pada tataran ekologi mampu menciptakan turbulensi baru pada lingkungan sistemik. Tepatnya ketika identifikasi kelangkaan dan krisis sumber daya alam memicu eskalasi emisi global secara simultan dan berdampak secara lintas batas. Terlebih ketika itu terkait dengan sumber daya strategis.

Konstruksi kesepahaman pun harus kompleks dan dinamis sehingga membangun kolaborasi dan ini yang menjadi bagian kritical bekerjanya diplomasi lingkungan. Artinya, inter-relasi secara simultan bagi negara dunia dan lingkungan memang mewujud dalam berbagai struktur perjuangan kepentingan negara. Diplomasi lingkungan dihadirkan sebagai instrumen kebijakan luar negeri juga harus kuat secara konstruksi sehingga solusi yang tidak terbantahkan dalam persoalan lingkungan tersebut.

Tiongkok dan Hilirisasi; Sebuah *Nexus* Diplomasi Lingkungan Indonesia

Negara dunia menyikapi kebijakan tarif perdagangan dengan menyesuaikan struktur pada mestiknya. Indonesia misalnya, memformulasikan tiga strategi seperti hilirisasi sumber daya alam, memperluas mitra dagang Indonesia serta memperkuat daya beli masyarakat melalui program program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Bahkan dari ketiga strategi di atas hilirisasi sejatinya menjadi ujung tombak dua strategi lainnya. Ini berelevansi dengan industri dan kemandirian negara. Merujuk pengalaman kemandirian Tiongkok dalam banyak bidang termasuk industri, sejatinya telah didesain sejak kepemimpinan Mao Zedong (1949-1976). China pada di bawah kepemimpinan Mao mengisolasi diri dari berbagai pengaruh dan interaksi global terutama pada dunia barat dan Uni Soviet. Mao menekan ketergantungan pada bantuan dan impor dari luar negeri. Sementara itu dengan kapabilitas domestiknya Tiongkok fokus kepada pembangunan ekonomi melalui perkembangan sektor militer dan pertahanan, swasembada pertanian, dan industri.

Hilirisasi sejatinya bukan hal baru bagi Indonesia meskipun lebih dari sedekade lalu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) disahkan. Isinya mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Jauh sebelum itu sejarah Indonesia pada aktivitas-aktivitas pengolahan dan pemurnian sumber daya alam 1970an telah dilakukan oleh BUMN. Seperti pembangunan pabrik smelter di Sulawesi Barat oleh BUMN seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang mulai mengoperasikan pabrik feronikel sejak 1973 (ANRI, 2008; Kompas, 2024). Kemudian PT Indonesia Asahan Alumina (INALUM) di Sumatera Utara yang mengelola pabrik alumina ingot sejak 1976 (ANRI, 2008; Kompas, 2024). Aktivitas hilirisasi selain bidang minerba seperti kehutanan di Kalimantan Tengah. Tepatnya pada PT Korindo yang didirikan sejak tahun 1969 dalam pengolahan kayu lapis dan juga kertas sebagai produksi ekspor global.

Hilirisasi kembali digagas dalam era kepresidenan Joko Widodo melalui larangan ekspor nikel dan himbauan pengelolaan secara mandiri pada nikel. Hilirisasi ini menunjukkan sikap *protean power* bagi Indonesia dalam mengelola kapabilitas dengan cara yang adaptif dengan kondisi kini.

Bahkan hilirisasi yang digagas Indonesia sejatinya berpotensi menggeser posisi Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi negara industri. Hal ini mampu mendorong tumbuhnya pusat kawasan industri baru dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan kondisi Indonesia misalnya dalam penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor riil. Misalnya mulai dari pengolahan secara mandiri dari rumpun terkecil hingga industri manufaktur dan berbagai jasa pendukung dalam penguatan ekonomi domestik. Integrasi industri dalam satu kawasan, misalnya diawali dengan melihat bagaimana zona tata ruang wilayah pada daerah-daerah di Indonesia yang menyediakan komponen SDA yang strategis. Bahkan perlu diikuti dengan misalnya melihat lokasi dan infrastruktur secara fisik dan non fisik. Hingga mempertimbangkan equilibrium pada lingkungan berkelanjutan.

Kemandirian, dengan mengandalkan kapasitas dan kapabilitas dalam negeri, merupakan tantangan besar dan tidak mudah. Sejarah kemandirian Tiongkok di masa Mao, di mana Mao menekan alokasi sumber daya negara untuk mendukung produksi domestik (Deng & Shen, 2024) namun dilakukan dengan tertutup dari global. Selain itu Mao mengontrol penggunaan produk dalam negeri dibandingkan produk luar negeri sebagai bentuk penguatan dan kemandirian China. Ini menjadi strategi besar Tiongkok dalam kemandiriannya. Demi mendukung ambisi tersebut, pemerintah secara besar mengalokasikan investasi pada proyek negara dan nasionalisasi perusahaan memperkuat sektor industri. Upaya besar ini berbanding lurus dengan resiko dan konsekuensi ekonominya.

Tekanan tersebut menurut Deng & Shen membawa Tiongkok terjebak dalam kondisi low equilibrium dan distorsi; di mana Tiongkok mengalami keseimbangan rendah dari beberapa faktor yang membatasi ekonomi (Deng & Shen, 2024). Seperti informasi asimetris tentang pasar global karena pasar memiliki harga yang ditentukan oleh pemerintah Tiongkok. Pemerintah menetapkan harga yang rendah bagi pekerja. Faktor-faktor ini menjadi bagian dari akumulasi catatan Tiongkok dalam mempertimbangan keterbukaan pada masa Deng Xiao Ping (1978). Bahkan sejarah isolasi negara dalam kemandirian ini menjadi kekuatan fundamental Tiongkok ketika membangkitkan diri di kanvas global pada abad 21. Kemandirian itu akan berbeda ketika dilakukan negara pada kondisi ini. Indonesia dengan strategi hilirisasi sejatinya memiliki kondisi yang sangat menguntungkan ketika diambisikan saat ini. Hilirisasi sendiri akan memicu bagi perluasan mitra dagang Indonesia sebagaimana yang menjadi strategi dalam menghadapi kebijakan tarif. Perluasan ini akan memberikan peluang kerjasama sub-sub nasional pada berbagai provinsi di Indonesia dengan sub-sub nasional dari negara lain. Deng Xiao Ping bahkan merubah keterisolasian melalui kerjasama internasional dalam meningkatkan perekonomiannya.

Meskipun begitu, relasi Indonesia kini dengan kapasitas dan oportunitasnya telah terbangun bersama mitra-mitra global yang sangat strategis. Misalnya melalui penguatan selain yang telah terbangun dengan negara maju adalah antar negara selatan global (*Global South*). Terutama dalam kerjasama lingkungan dan pembentukan norma-norma bagi masyarakat global secara multilateral pada berbagai kesepakatan. Jejaring kerjasama diplomatik ini selain memperkuat kepercayaan global juga memperkuat perdagangan Indonesia. Khususnya dengan produk dalam negerinya secara kompetitif di pasar global. Sehingga sumber mineral misalnya nikel di mana Indonesia merupakan sumber cadangan besar global bagi rantai pasok teknologi baterai. Atau sumber daya energi Indonesia seperti batubara yang selama ini juga diekspor secara mentah dapat dilakukan dalam pengolahan berbagai produk turunan yang mendukung energi baru dan terbarukan. Sehingga penerapan hilirisasi mengunggah sumber daya ini melalui diekspor Indonesia ketika sudah diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Selain itu, melekatnya identitas lingkungan pada Indonesia sangat berelevansi dengan keadaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Nilai dan makna yang tinggi pada kekayaan alam Indonesia ini yang akan mempengaruhi cara pandang dan kebijakan yang akan dibuat oleh agen dalam praktik keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Karena, hilirisasi sejatinya mengendalikan rantai nilai sumber daya alamnya. Diplomasi lingkungan Indonesia melalui hilirisasinya dapat memperkuat posisi dalam percaturan geopolitik dan mereduksi kerentanannya terhadap konflik global. Potensi diplomasi lingkungan bagi Indonesia sebagai sarana transformasi identitas dan hubungan antarnegara.

KESIMPULAN

Menjadikan diplomasi lingkungan sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang kuat dalam menghadapi turbulensi global (Strojny dkk., 2023), tidak terlepas dari upaya penciptaan zona aman bagi kerjasama dan kolaborasi dalam membangun kesepahaman pada *nexus* geopolitik-lingkungan. Indonesia dapat sekaligus merekonstruksikan posisi yang stabil sebagai *strategic hub* dalam percaturan geopolitik global yang turbulenti melalui hilirisasi SDA dalam diplomasi lingkungan Indonesia. *Nexus* diplomasi lingkungan dan geopolitik terletak pada kekuatan energi dan lingkungan. Bisa dipastikan bahwa tidak ada keberlanjutan ekonomi atau teknologi ketika kekuatan energi dan lingkungan tidak mendukung.

Turbulensi geopolitik bukan hanya difusi kekuasaan tetapi tentang bagaimana state agent beradaptasi (Harake, 2024). Inilah kenapa fragmentasi aliansi global berpotensi bagi Indonesia untuk beradaptasi dan mengeluarkan solusi yang inovatif. Meski tantangannya ketika negara-negara besar menggaungkan slogan sebagai alat untuk membangun persepsi, membentuk identitas nasional, dan mempengaruhi opini internasional. Seperti AS, MAGA diberdayakan untuk merekonstruksi identitas *superpower*-nya. Sementara Tiongkok menghidupkan Jalur Sutra melalui BRI. Sehingga hilirisasi dapat menjadi *interaction-driven identity* terbangun dari berbagai interaksi Indonesia. Meskipun *domestic-driven identity* juga terbangun dari sejarah Indonesia. Kesemuanya adalah manifestasi dari cara state agents mengkonstruksi kekuatan melalui kebijakan luar negeri yang konsisten dikomunikasikan (Wang & Zou, 2025). Sehingga persepsi Tiongkok bagi Amerika atau sebaliknya tidak muncul dari realitas objektif tetapi dari mekanisme konstruksi sosial melalui interaksi yang berulang dan saling memperkuat. Sementara Indonesia dapat mempertahankan *strategic autonomy* dan tidak terjebak dalam persepsi ancaman yang dibawa *superpower* (Harake, 2024). Inilah mengapa bagi konstruktivisme, kekuatan global tidak ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau militer semata, namun juga dari keberhasilan aktor membangun narasi dan identitas yang diakui dan diikuti oleh aktor internasional. Baik itu terbentuk dari akar domestik menuju holistik maupun dari sistemik sebagai sebuah cara mempersepsikan diri dan aktor lainnya. Kontestasi geopolitik pada akhirnya, bukan sekadar persaingan kekuatan material seperti militer semata, namun pertarungan narasi, identitas, dan konstruksi sosial atas makna kejayaan, kepemimpinan, dan masa depan dunia (Harake, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (2008). Inventaris Arsip PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (1931-1942). ANRI
- Asmawati, Yunita. (2006). Military Industrial Complex dan Industri Pesawat Tempur di Amerika Serikat pasca perang dingin (Tesis, Universitas Gadjah Mada). UGM Repository.

<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/124348>.

- Asmawati, Yunita. (2017). Diplomasi lingkungan Indonesia kepada Norwegia dalam menerapkan REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus) di Kalimantan Tengah. Universitas Padjadjaran. <https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170330110003>.
- Asadov, B., & Asadov, E. (2020). Problems of organizational sustainable channels for international environmental cooperation in terms of new challenges on the example of the Baltic region. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 578, pp. 012059). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/578/1/012059>.
- Bilder, R. B., Wippman, D., Crocker, C., Hampson, F., & Aall, P. R. (1997). *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict*. <https://doi.org/10.2307/20047962>
- Brzezinski, Zbigniew. (2017). How to Address Strategic Insecurity in a Turbulent Age. *New Perspectives Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/npqu.12079>.
- Checkel, J. T. (2008). *Constructivism and Foreign policy. Foreign policy: theories, actors, cases*. Oxford University Press.
- Charskykh, I. (2022). Incorporated by the Mainstream: Constructivism in the Theory of International Relations. *Mediaforum*, 11, 57–76. <https://doi.org/10.31861/mediaforum.2022.11.57-76>.
- Clark, J., & Jones, A. (2019). Geopolitical teleconnections: Diplomacy, events, and foreign policy. *Political Geography*, 75, 102049. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102049>.
- Coulson, B. (2022). We Don't Win Anymore: Donald Trump, China, and the Politics of Victimhood Nationalism. *Polity*, 54(4), 882–889. <https://doi.org/10.1086/721557>.
- Crocker, C. A., Hampson, F., & Aall, P. R. (Eds.). (2001). *Turbulent peace: The challenges of managing international conflict*. United States Institute of Peace Press.
- Deng, K., & Shen, J. H. (2014). From State Resource Allocation to a 'Low Level Equilibrium Trap': Re-evaluation of Economic Performance of Mao's China, 1949-78. *London School of Economics and Political Science*. http://eprints.lse.ac.uk/101127/1/Deng_from_state_resource_allocation_published.pdf.
- Dodds, K. (2007). *Geopolitics: A very short introduction*. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780199206582.001.0001>.
- Finnemore, Martha. (1996). *National interests in international society*. Cornell University Press.
- Foster, J. B. (2025, May 1). *The MAGA Ideology and the Trumps Regime*. *Monthly Review; An Independent Socialist Magazine Review of the Month*. Volume 77, Number 01. New York: Monthly Review Foundation.
- Harake, M. (2024). *Post-Conflict Public Sector Projects: Measuring the Performance of International Interventions to Ensure Effective Peacebuilding*. ARPHA Conference Abstracts. <https://doi.org/10.3897/aca.7.e129726>.
- Ignatyeva, И., & Исаев. (2019). Modern trends in geo-economics and geopolitics. In *Proceedings of the International Conference Communicative Strategies of Information Society (CSIS 2018)*. <https://doi.org/10.2991/csis-18.2019.104>.
- IP Defense Forum. (2024, October 25). *At Malabar 2024, Quad nations promote maritime order for a Free and Open Indo-Pacific*. <https://ipdefenseforum.com/2024/10/at-malabar-2024-quad-nations-promote-maritime-order-for-a-free-and-open-indo-pacific/>.
- Johnston, Alastair Iain (1995). *Cultural realism: Strategic culture and grand strategy in Chinese*

history. Princeton University Press.

- Kolossov, V., & Vendina, O. (2016). The Heartland Theory and the Present-Day Geopolitical Structure of Eurasia. *Journal of Strategic Studies*, 22(2/3), 15-38. <https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/Monographs/1006Rethinking-4.pdf>.
- Lawler, P. A. (2024). 8. Constructivism And International Relations. 277–320. <https://doi.org/10.1093/hepl/9780198784890.003.0008>.
- Legro, Jeffrey W. (1997). Which norms matter? Revisiting the “failure” of internationalism. *International Organization*, 51(1), 31–63. <https://doi.org/10.1017/S0020818300003469>.
- Lighthizer, Robert. (2023). No trade is free: Changing course, taking on China, and helping America's workers. Broadside Books.
- McDougall, D. (2023). AUKUS: a Commonwealth perspective. *The Round Table*, 112(6), 567–581. <https://doi.org/10.1080/00358533.2023.2286841>.
- Hickel, F. R., & Murphy, A. R. (2021). Making America Exceptional Again: Donald Trump’s Traditionalist Jeremiad, Civil Religion, and the Politics of Resentment. *Politics and Religion*, 1–23. <https://doi.org/10.1017/S1755048321000249>.
- JETP Secretariat Indonesia. (2023). Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) 2023. https://jetp-id.org/storage/official-jetp-cipp-2023-vshare_en-1700473079.pdf
- Joy, J., Karlekar, L., & Tripathi, A. (2025). ‘Maritime Big Play Strategy’: Solidifying the role of Aukus in the Indo-Pacific region. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(8), 2025472. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025372>.
- Katzenstein, P. J. (1989). International relations theory and the analysis of change. Global changes and theoretical challenges: Approaches to World Politics for the 8-1990s, Lexington, Lexington Box.
- Katzenstein, P. J. (1996). The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. Columbia University Press.
- Katzenstein, P. J., & Seybert, L. A. (2021). Protean power and uncertainty: Exploring the unexpected in world politics. *Journal of Political Research*, 17(1), 141–156. <https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.863>.
- Kompas.id. (2024). Sepuluh Tahun Hilirisasi Mineral.
- McBride, J., Berman, N., & Chatzky, A. (2023, February 2). China’s massive Belt and Road Initiative. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative>.
- McConnell, F. (2019). Rethinking the Geographies of Diplomacy. *Diplomatica*, 1(1), 46-55. <https://doi.org/10.1163/25891774-00101008>.
- Nye, J. S. (2025). The Future of American Soft Power. Project Syndicate.
- Obaidullah, M. D., & Hossain, M. (2025). China's soft power strategy in the Middle East and East Asia: A comparative analysis. Springer Nature Singapore Pte Ltd.
- Pereira. (2015). Isu lingkungan hidup dan hubungan internasional, tatanan (dis) global baru - peran Hubungan Internasional dalam mempromosikan sistem internasional yang terpadu. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 58(1), 191-209. <https://doi.org/10.1590/0034-7329201500110>.
- Rosenau, J. (1990). Turbulence in world politics: A theory of change and continuity. Westview Press.
- Rosenau, James N. 1969. International Politics and Foreign policy; A Reader in Research and Theory.

Revised Edition. Selected Reading, hal: 41-56. New York, United States: Free Press.

- Siemon, T. (2020, April 27). Russia's military spending: Frequently asked questions. <https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2020/russias-military-spending-frequently-asked-questions>.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2022). SIPRI Yearbook 2022 Summary [PDF]. https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-06/yb22_summary_en_v2_0.pdf.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2023). SIPRI Yearbook 2023 Summary [PDF]. https://www.sipri.org/sites/default/files/202306/yb23_summary_en_0.pdf.
- Stockholm International Peace Research Institute. (2024). Critical Minerals and Great Power Competition. SIPRI. https://www.sipri.org/sites/default/files/2024-10/critical_minerals.pdf.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2025, April 28). Unprecedented rise in global military expenditure as European and Middle East spending surges. <https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2020/russias-military-spending-frequently-asked-questions>.
- Stockholm International Peace Research Institute. (2025, March 10). US arms exports to Europe triple, boosted by Ukraine aid: SIPRI. <https://www.defensenews.com/global/europe/2025/03/10/us-arms-exports-to-europe-triple-boosted-by-ukraine-aid-sipri/>.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2025). Military expenditure and arms production. Diakses dari <https://www.dw.com/id/belanja-militer-dunia-kembali-cetak-rekor-baru/a-72371655>.
- Skons, Elisabeth dkk. 2001. Military Expenditure and Arms Production. Dalam SIPRI Yearbook 2001. 2001. Armaments, Disarmaments and International Security. URL <https://www.sipri.org/yearbook/2001/04>.
- Smith, Steve. Amelia Hadfield and Tim Dunne. Foreign Policy; Theories, Actor, Cases. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
- Snyder, J. (2004). Halford J. Mackinder, Geopolitics, and the Heartland Thesis. *Geopolitics*, 19 (3), 567-589. <https://doi.org/10.1080/07075332.2014.941904>.
- Kolossov, V., & Vendina, O. (2016). The Heartland Theory and the Present-Day Geopolitical Structure of Eurasia. *Journal of Strategic Studies*, 22(2/3), 15-38. <https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/Monographs/1006Rethinking-4.pdf>.
- Susskind, Lawrence., Ali, Saleem., & Hamid, Zakri Abdul. (2014). Environmental diplomacy: Negotiating more effective global agreements (2nd ed.). Oxford University Press.
- Tung, R. L., Zander, I., & Fang, T. (2023). The Tech Cold War, the multipolarization of the world economy, and IB research. Elsevier BV. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102195>.
- U.S. Geological Survey. (2024). Mineral commodity summaries 2024. [usgs.gov](https://www.usgs.gov)
- Wang, Z., & Zou, B. (2025). Principles of Extensive Consultation, Joint Contribution, and Shared Benefits: The Concept, Practice, and Optimization Path of China's Leadership in the Reform of the Global Governance System. *Journal of Social Development and History*. <https://doi.org/10.71052/jsdh/xvgb2526>.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391-425. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>.

Yaqoub, M., Matusitz, J., Jingwu, Z., et al. (2026). Global soft power in the 21st century: A two-decade global perspective. *Humanities and Social Sciences Communications*, 13(1), 313. <https://doi.org/10.1057/s41599-026-06644-y>.

Copyright holder:

Yunita Asmawati (2026)

First publication right:

[Andalas Journal of International Studies](#)

This article is licensed under:

